

Kemiskinan dalam bayang-bayang kekayaan alam: Analisis ketimpangan di provinsi Papua Barat

Auliya Zuhrin

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: auliyazuhrin@gmail.com

Kata Kunci:

Kemiskinan struktural, ketimpangan spasial, Papua Barat, SDGS, pemetaan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan.

Keywords:

Structural poverty, spatial inequality, West Papua, SDGS, poverty mapping, sustainable development.

ABSTRAK

Papua Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan, hingga kelautan. Ironisnya, meskipun dikaruniai potensi alam yang besar, Papua Barat justru menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Keadaan ini menimbulkan kejanggalan dan pertanyaan: mengapa kemiskinan tetap tinggi di tengah melimpahnya kekayaan alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan kesejahteraan di Papua Barat melalui pendekatan spasial, serta mengaitkannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 10

(Mengurangi Ketimpangan). Dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 dan teknologi pemetaan GIS (Geographic Information System), penelitian ini memetakan sebaran garis kemiskinan di wilayah Papua Barat dan mengelompokkannya dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antar wilayah kabupaten/kota di Papua Barat. Beberapa daerah seperti Teluk Bintuni dan Manokwari memiliki tingkat kemiskinan tinggi, sementara wilayah seperti Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan spasial dan kualitas pembangunan antar wilayah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Visualisasi spasial melalui peta tematik diharapkan dapat menjadi alat bantu strategis dalam menanggulangi kemiskinan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga struktural dan multidimensi sebagaimana ditunjukkan dalam teori kemiskinan struktural. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan Papua Barat dapat lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan yang diusung dalam SDGs.

ABSTRACT

West Papua is one of the regions in Indonesia that is known to have abundant natural resources, ranging from mining products, forests, to marine resources. Ironically, despite being blessed with great natural potential, West Papua is actually one of the provinces with the highest poverty rate in Indonesia. This situation raises an awkward question: why poverty remains high amidst the abundance of natural resources. This study aims to analyze welfare inequality in West Papua through a spatial approach, and relate it to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly goal 1 (No Poverty) and goal 10 (Reducing Inequality). Using secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) for 2024 and Geographic Information System (GIS) mapping technology, this study maps the distribution of poverty lines in the Papua Barat region and categorizes them as low, medium, and high. The results of the



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

analysis show that there are significant inequalities between districts/cities in Papua Barat. Some regions such as Teluk Bintuni and Manokwari have high poverty rates, while regions such as Teluk Wondama, South Manokwari, and Arfak Mountains show lower poverty rates. This finding confirms the existence of spatial disparities and development quality between regions. This research contributes to the development of evidence-based policy, particularly in equitable and sustainable regional development planning. Spatial visualization through thematic maps is expected to be a strategic tool in tackling poverty that is not only economic, but also structural and multidimensional as indicated in the structural poverty theory. With this approach, it is hoped that West Papua's development can be more inclusive and in accordance with the principles of social justice and sustainability promoted in the SDGs.

Pendahuluan

Papua dikenal sebagai daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang, hutan, dan laut. Kekayaan alam melimpah merupakan sebuah anugrah tuhan yang Maha Esa, dan jika dikelola dengan benar akan memberikan keuntungan dan dapat menjadi sebuah trobosan wilayah tersebut untuk sejahtera. Namun, ironisnya, Papua justru menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia (Yanuarti, 2012). Menurut (Afalia et al., 2023), capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan, termasuk kondisi sosial-ekonomi dan kualitas layanan publik, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan kekayaan alam belum sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Secara teori, seharusnya daerah dengan kekayaan alam yang melimpah memiliki kesejahteraan yang tinggi pula dan kemiskinan yang rendah (Sholikin, 2020). Hal ini menjadi sebuah kejanggalan, bahwa seharusnya dengan SDA yang melimpah dapat menjadi peluang masyarakat setempat hidup sejahtera dan memberikan banyak peluang masyarakat untuk mendapat banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat terbebas dari belenggu kemiskinan. Banyak penelitian terdahulu membahas tentang kemiskinan atau pembangunan di Papua, namun belum mengangkat secara mendalam relasi antara kekayaan SDA dengan ketimpangan kesejahteraan secara spasial (wilayah). Yang hanya focus membahas kekayaan alam yang melimpah di papua namun masih tinggi tingkat kemiskinan wilayah tersebut (Yanuarti, 2012).

Perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu, karna kurangnya pendekatan spasial dan visualisasi seperti peta tematik dalam menganalisis kemiskinan di Papua, serta belum banyak yang mengaitkannya langsung dengan target SDGs. Dan focus kajian dalam artikel ini akan membahas salah satu provinsi di papua yaitu papua barat, karna papua barat termasuk yang dikategorikan oleh pemerintah sebagai daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). (Dzahabiy et al., 2025) menunjukkan melalui uji kausalitas Granger bahwa terdapat hubungan saling memengaruhi antara Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan, sehingga memperkuat pentingnya analisis mendalam dan terarah dalam memahami dinamika pembangunan di wilayah yang rentan seperti Papua Barat

Sehingga diharapkan kajian ini dapat meninjau sejauh mana tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat dijangkau di daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang terbilang cukup berat. Dengan menganalisis distribusi kemiskinan menggunakan data BPS 2024 dan peta GIS, artikel ini memberikan gambaran visual ketimpangan, sekaligus menyuarakan urgensi pembangunan berkeadilan sebagai kontribusi pada pencapaian SDGs khususnya dalam mencapai Nomor 1 dan 10. (Alisjahbana et al., 2018) Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih dalam terkait faktor yang melatarbelakangi adanya kegagalan, terkait wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah namun tingkat kemiskinan nya juga terbilang cukup tinggi. (Cholifah & Alfi, 2022)

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kondisi individual akibat kemalasan seperti yang disebut Selo Soemardjan, tetapi juga sebagai masalah struktural yang disebabkan oleh distorsi dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi yang membatasi akses terhadap sumber daya. Bank Dunia menekankan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, mencakup aspek pendapatan, kesehatan, dan keamanan, sedangkan Ted K. Bradshaw menyoroti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. (Ihalauw, 2011) Ketimpangan wilayah turut memperkuat kemiskinan, sebab semakin tinggi ketimpangan pembangunan, semakin besar kemungkinan suatu wilayah mengalami kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan (Ginting, 2015) Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan), yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sebagai pilar utama pembangunan global. Ketimpangan sendiri bersifat multidimensi, sebagaimana dilaporkan UNESCO, mencakup ketimpangan ekonomi, sosial, budaya, politik, spasial, dan lainnya, yang saling berkaitan dan memperburuk kondisi masyarakat miskin secara menyeluruh. (SDGs Tanpa Kemiskinan, 2021)

Teks Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan menggambarkan persebaran tingkat kemiskinan di wilayah papua barat secara spasial. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi indikator kemiskinan yakni garis kemiskinan di wilayah papua barat. (Aziza, 2023)

Dalam penelitian ini, pengklasifikasian tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan pendekatan spasial berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Data yang digunakan meliputi garis kemiskinan per kabupaten/kota, persentase penduduk miskin, serta jumlah penduduk miskin. (Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten_Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Papua Barat, 2025, n.d.) Garis kemiskinan Provinsi Papua Barat per Desember 2024 tercatat sebesar Rp 793.804 per kapita per bulan, yang terdiri dari Rp 591.920 kebutuhan makanan dan Rp 201.884 untuk kebutuhan non-makanan. (Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten_Kota Di Provinsi Papua Barat, 2024, n.d.) Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS dengan metode klasifikasi kuantil (quantile classification) menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kategori "rendah" mencakup kabupaten/kota yang memiliki nilai garis kemiskinan berada pada kuartil bawah ($<25\%$), kategori "sedang" untuk daerah dengan nilai garis kemiskinan di antara kuartil tengah ($25-75\%$), dan kategori "tinggi" bagi daerah yang berada pada kuartil atas ($\geq 75\%$). Pengelompokan ini

bertujuan untuk memberikan representasi visual yang adil dan merata terhadap sebaran kemiskinan di wilayah tersebut.

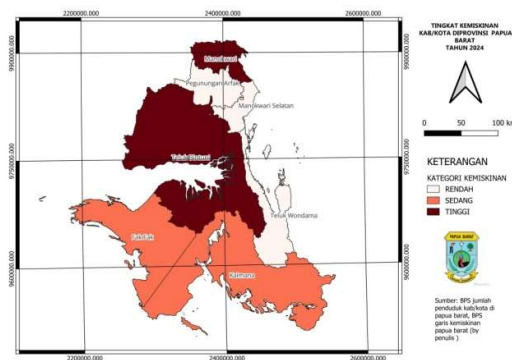
Visualisasi data pada peta menunjukkan bahwa daerah seperti Teluk Bintuni dan Manokwari termasuk dalam kategori kemiskinan tinggi (berwarna merah gelap), menandakan tingkat kemiskinan yang serius meskipun wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Daerah dengan kategori sedang (berwarna oranye) seperti Fak-Fak dan Kaimana memiliki tingkat kemiskinan menengah yang masih membutuhkan perhatian. Sementara itu, daerah seperti Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak tergolong dalam kategori rendah (berwarna putih), menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Papua Barat. Klasifikasi ini tidak hanya didasarkan pada angka absolut, tetapi juga mempertimbangkan struktur distribusi data antarwilayah secara proporsional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan spasial kemiskinan di Papua Barat serta memahami faktor geografis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di tiap daerah. (Azizah, 2023)

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran kuantitatif dan spasial yang jelas mengenai persebaran kemiskinan di wilayah yang diteliti. Dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan pemanfaatan teknologi pemetaan digital seperti QGIS, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan wilayah (evidence-based spatial policy) dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Pembahasan

Secara geografis letak wilayah provinsi Papua Barat mencakup kawasan kepulauan pulau-pulau Papua yang memiliki banyak kepulauan yang mengelilinginya. Di sebelah utara, provinsi tersebut berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah barat berbatasan dengan provinsi Maluku, dan bagian timur dari provinsi tersebut berbatasan dengan Teluk Cendrawasih, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Tenggara berbatasan dengan provinsi Papua Tengah. (P. P. P. Barat., n.d.)

Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam (SDA) seperti halnya tambang emas, tembaga, dan hutan yang luas, namun yang menjadi ironinya provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini juga mengalami kondisi garis kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia. Papua Barat juga tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi kedua di Indonesia. (Harianja et al., 2020) Sebagaimana yang telah tercatat dalam BPS garis kemiskinan di Papua Barat yang kemudian divisualisasikan menggunakan peta informasi dengan dikategorikan menjadi beberapa kategori garis kemiskinan di provinsi Papua Barat sebagai berikut:



Gambar 1. Peta persebaran garis kemiskinan di provinsi papua barat.

Peta tersebut menunjukkan bahwa garis kemiskinan yang tinggi berada di kota/kabupaten teluk bintuni dan manokwari yang ditandai dengan warna merah gelap yang berarti menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut merupakan kota/ kabupaten dengan garis kemiskinan yang tinggi. (Kabupaten Teluk Bintuni Miliki Sebaran Penduduk Miskin Ekstrem Tertinggi Di Provinsi Papua Barat, 2023) Dan kemiskinan yang paling rendah berada pada kota Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak, namun secara keseluruhan daerah yang berada di papua barat ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia, disebutkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang mayoritas penduduk disana tingkat pendidikan hanya lulusan sekolah dasar (SD) sehingga menyebabkan tingkat kualitas sumber daya manusinya juga rendah (Rifqi et al., 2020) dalam pembahasan ini lebih cenderung membahas terkait garis kemiskinan yang ada di papua barat, garis kemiskinan sendiri merupakan suatu indikator untuk menentukan seseorang atau keluarga hidup dalam kondisi miskin. Yang mana di Indonesia menghitung garis kemiskinan dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. (kontributor, 2025)

Kemiskinan yang terjadi selalu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa penelitian terdahulu yang menyebutkan, bahwa kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama yang berkaitan dengan aspek konsumsi, pembangunan manusia, pendidikan, pendapatan, dan inflasi. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut secara bersama-sama memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan.

Dari berbagai variabel dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa konsumsi dan kualitas pembangunan manusia merupakan dua faktor yang paling berpengaruh secara nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, semakin kecil kemungkinan seseorang masuk dalam kategori kemiskinan. sebagaimana indikator umum kemiskinan yang mengacu pada kecukupan gizi harian.

Disisi lain, penningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang terbukti merupakan kunci dalam menekan angka kemiskinan.

Adanya penemuan yang di teliti tersebut menggambarkan bahwa jika memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan bukan hanya focus dengan bantuan langsung atau intervensi jangka pendek, namun perlu strategi komprehensif yang mencakup pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan dasar. Yang harus juga focus pada peningkatan kualitas konsumsi dan penguatan indeks pembangunan manusia. (Pratama, Citra, 2019)

Dalam SDGs menyatakan no poverty yang berarti tanpa kemiskinan, menjadi poin utama dan diprioritaskan. Yang berarti dunia bersepakat dalam hal menuntaskan kemiskinan dalam berbagai bentuk apapun diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Menghilangkan kemiskinan akan berkiatan dengan tujuan global lainnya, diantaranya dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energi bersih, terjangkau dan seterusnya, maka dari itu penting adanya kemitraan untuk mencapai semua tujuan tersebut. Indonesia sendiri, menganggap bahwa kemiskinan merupakan persoalan dan menjadi beban berat, sebagai bagian anggota PBB Indonesia pasti berkomitmen dalam mengatasi persoalan persoalan yang beriringan dengan deklarasi SDGs. Yang berarti Indonesia juga di tuntutan dalam mewujudkan tuntutan yang disampaikan dalam deklarasi di forum PBB tersebut. (Solomon, 2023)

Pemberantasan kemiskinan juga akan berimbans pada penurunan terjadinya kesenjangan sebagaimana tujuan SDGs 10 “mengurangi kesenjangan” berdasarkan jenis kelamin, usia, cacat, ras, kelas, etnis, agama dan kesempatan baik di dalam dan antar negara. Berbagai pemimpin di dunia mengakui kontribusi positif dari migrasi internasional untuk pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan. (Patiung, 2017) Pengukuran ketimpangan salah satunya menggunakan Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 1-0. Jika semakin tinggi nilai Gini Ratio memperlihatkan bahwa semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi. Gini Ratio di kota/ kabupaten yang ada di papua barat yang terendah 0,283 hingga yang tertinggi mencapai 0,420 (Rasio Gini Menurut Kabupaten_Kota Di Provinsi Papua Barat, 2023, n.d.)

Ketimpangan bukan hanya dilihat dari segi kekayaan, tapi kesempatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan juga diperhitungkan dalam hal ketimpangan. Maka sulitnya mengakses pendidikan itu juga disebut sebuah ketimpangan dikarenakan pembiayaan subsidi untuk pendidikan di Indonesia di ambil dari 20% anggaran APBN yang dikatakan masih belum tepat sasaran, terjadinya hal tersebut dilatar belakangi karna terjadi permasalahan dalam hal kualitas pendidikan di Indonesia yang sepenuhnya belum berada dalam kondisi yang baik. (Nadya & Syafri, 2019)

Pemerintah sebenarnya telah merumuskan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya, program dana otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua barat sejak awal dirancang untuk mendorong pembangunan dan mengurangi ketimpangan, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berbagai kajian menunjukan adanya efektivitas Dana Otsus dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun dikatakan bahwa efektivitas

dari program ini belum merata, dan mengalami masalah dalam menghadapi tantangan tata kelola. Salah satu penemuan penting berasal dari hasil penelitian kuantitatif di Papua Barat yang menunjukkan bahwa program tersebut memiliki hubungan negative signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya semakin besar Dana Otsus yang diberikan maka semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. (P. Barat et al., 2022)

Kesimpulan dan Saran

Kemiskinan di Papua Barat merupakan paradoks nyata yang menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah tidak serta merta menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. Hasil analisis spasial dalam penelitian ini membuktikan bahwa ketimpangan kemiskinan di Papua Barat tersebar tidak merata, dengan beberapa wilayah seperti Teluk Bintuni dan Manokwari mengalami garis kemiskinan yang sangat tinggi, meskipun provinsi ini kaya akan sumber daya seperti tambang dan hutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua Barat tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh distorsi struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta distribusi pembangunan yang tidak merata. Teori kemiskinan struktural menjadi kerangka yang relevan dalam menjelaskan fenomena ini, di mana sistem sosial, ekonomi, dan politik secara keseluruhan belum berpihak pada masyarakat lokal.

Temuan ini diperkuat dengan pemanfaatan data BPS dan analisis spasial menggunakan QGIS yang berhasil memvisualisasikan perbedaan garis kemiskinan antar wilayah. Pendekatan spasial ini memberikan gambaran visual yang kuat tentang bagaimana ketimpangan wilayah turut memperdalam kemiskinan, dan mengapa pembangunan di daerah 3T seperti Papua Barat harus didesain secara kontekstual, adil, dan berbasis wilayah. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan), studi ini menyuarakan pentingnya kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Pembangunan tidak bisa lagi hanya mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi SDA, namun juga harus memperhatikan keadilan distribusi manfaat kepada masyarakat lokal.

Oleh karena itu, rekomendasi dari hasil kajian ini adalah perlunya pendekatan pembangunan berbasis wilayah (place-based development), penguatan pendidikan, peningkatan akses layanan dasar, dan pelibatan masyarakat adat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan SDA. Hanya dengan demikian, ketimpangan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat benar-benar dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Afalia, W. A., Hamda, I. H., Adriana, S. A. A., Alamsyah, A. F. A., & Wafiroh, N. L. W. (2023). Determinants Of Human Development Index In Papua Province 2012-2021. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(2), 246–256. <http://repository.uin-malang.ac.id/17843/>

- Alisjahbana, A., Yusuf, A. A., Anna, Z., Hadisoemarto, P. F., Kadarisman, A., Maulana, N., Larasati, W., Ghina, A. A., Rahma, & Megananda. (2018). *Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia*. Unpad Press Bandung; 2018.
- Aziza, N. (2023). Metodologi penelitian 1: Deskriptif kuantitatif. *ResearchGate*, July, 166–178.
- Azizah, M. N. (2023). Analisis Kerentanan Daerah Rawan Longsor Menggunakan Sig (Sistem Informasi Geografis) Dengan Aplikasi Qgis Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- Barat., P. P. P. (n.d.). *Sekilas Papua Barat*. https://papubaratprov.go.id/home/pages?slug=uOKLUNBY95pxrXKYerNjwGbjiITU_8Ns
- Barat, P., Permasalahan, M., Perkebunan, P., Sawit, K., Pelaksanaan, M., Padat, P., Tunai, K., Monitoring, P., Pengembangan, E., Pemasaran, D., Pelaksanaan, A., Pendanaan, S., & Kereta, P. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa Full Scholarship 5000*. 02.
- Cholifah, N., & Alfi, C. (2022). Mengembangkan Kemampuan Berpikir Spasial Mahasiswa Melalui Pembelajaran Sistem Informasi Geografi Sebagai Penguat Karakter Peduli Lingkungan. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(3), 660. <http://repository.uin-malang.ac.id/12018/>
- Dzahabiy, A. S. S. F., Harini, S., & Juhari, J. (2025). Uji kausalitas granger dalam menganalisis hubungan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan. *Jurnal Riset Mahasiswa Matematika*, 4(4), 149–160. <http://repository.uin-malang.ac.id/23770/>
- Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Papua Barat*, 2024. (n.d.).
- Ginting, A. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20(1), 45–58.
- Harianja, Y., Sahara, & Muhammad Findi. (2020). Tingkat Kemiskinan Di Pulau Papua Tahun 2001-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 189–200. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.189-200>
- Ihalauw, M. (2011). *Teori-Teori Kemiskinan*. 19–78.
- Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat*, 2025. (n.d.).
- Kabupaten Teluk Bintuni Miliki Sebaran Penduduk Miskin Ekstrem Tertinggi di Provinsi Papua Barat*. (2023). Balleonews.
- kontributor. (2025). *Garis Kemiskinan di Indonesia: Menyikapi Tantangan dan Solusi*. <https://duniafintech.com/garis-kemiskinan-di-indonesia/>
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Patiung, M. (2017). Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal's Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 17(1), 70–85. <https://doi.org/10.30742/jisa1712017382>
- Pratama, Citra, Y. (2019). Analisis Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tujuan dari penelitian ini ada. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 1–15.
- Rasio Gini Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Papua Barat*, 2023. (n.d.).

- Rifqi, M., Fitriyani, A. N., Rosyida, Y. S., Masjoyo, Y. M., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2020). Analisis Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Tahun 2019. *Universitas Gadjah Mada*, October.
- SDGs Tanpa Kemiskinan. (2021). IPB University Repository. <https://sv.ipb.ac.id/sdgs-tanpa-kemiskinan/>
- Sholikin, A. (2020). Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dalam Perspektif Ilmu Politik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 24–40. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1898>
- Solomon, B. D. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs). *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*, 0042, 526–527. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104>
- Yanuarti, S. (2012). Kemiskinan dan konflik Papua di tengah sumber daya yang melimpah. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 33–46.